

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang hasil praktik kerja yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021 di KPRI KOPPU P3J. Disini penulis akan membahas tentang Sistem Akuntansi Piutang pada KPRI KOPPU P3J. Sebelum membahas tentang sistem akuntansi piutang pada perusahaan penulis akan membahas pedoman dasar sistem akuntansi piutang

#### **4.1 Pengertian Koperasi**

Menurut Arifin (2003:3) bahwa koperasi berasal dari kata Co-operations yang berarti bekerjasama diantara dua pihak atau lebih kerja sama di dalam bentuk koperasi secara universal diasosiasikan sebagai kerja sama dalam kegiatan ekonomi. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 ayat 1 yaitu koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan

#### 4.1.1 Nilai-nilai Koperasi

Adapun nilai-nilai koperasi yang dipandang sebagai nilai-nilai dasar (Fundamental) dan nilai-nilai etis. Nilai-nilai dasar meliputi menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri. Demokrasi, persamaan keadilan, dan kesetiakawanan, serta kepedulian terhadap orang lain. (ICA:1995).

##### 1. Nilai-nilai Dasar

###### a. Menolong Diri Sendiri (*self-help*)

Menolong diri sendiri (*self-help*) artinya motif kerja sama dalam kerja dalam koperasi bertujuan menggali potensi anggota guna menghimpun untuk memecahkan masalah melalui kerja sama.

###### b. Tanggung Jawab Sendiri (*self-responsibility*)

Tanggung jawab sendiri (*self-responsibility*) artinya sebagai cita-cita kemandirian dalam memecahkan masalah bersama dan juga cita-cita menegakan kebebasan ekonomi (otonom) dalam menentukan haluan koperasi.

###### c. Demokrasi (*Democracy*)

Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi oleh anggota dan aktif terlibat dalam menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan. Dalam koperasi primer, para anggota mempunyai hak suara sama (satu anggota satu suara) dan koperasi pada tingkat-tingkat lainnya dikelola secara demokratis.

Demokrasi (*democracy*) adalah cita-cita yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota. Hal ini berarti anggota koperasi terlebih secara aktif dalam menentukan haluan dan sekaligus mengendalikan jalannya koperasi. Menentukan haluan dan mengendalikan jalannya koperasi merupakan tanggung jawab anggota sebagai pemilik dan pengguna koperasi.

d. Persamaan (*Equality*)

Persamaan (*Equality*) adalah nilai yang berkaitan dengan perlakuan yang sama bagi setiap anggota tanpa memandang besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota. Semua anggota mempunyai kedudukan yang sama dan hak suara yang sama yaitu orang satu suara (*one man one vote*).

e. Keadilan (*Equity*)

keadilan (*Equity*) pada koperasi ditegakkan melalui mekanisme kelembagaan, seperti : pembagian SHU kepada anggota berdasarkan perimbangan jasa masing-masing anggota bukan berdasar pada pemilik modal, keuntungan yang diperoleh dari transaksi dengan selain anggota dialokasikan untuk meningkatkan pemupukan modal atau cadangan bukan untuk dibagikan kepada anggota. Berikut adalah komposisi pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) KPRI KOPPU P3J pada tahun 2019



**KOMPOSISI PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU)  
KPRI KOPPU P3J  
TAHUN 2019**

	NETTO		BRUTTO	
	2019	2018	2019	2018
<b>Hasil Usaha ( Yang Diperoleh Dari Anggota Untuk Anggota )</b>			Rp. 215.480.289	341.229.257
a. Keuntungan Untuk Anggota ( Menurut Jasa 25 % )	Rp. 53.870.072	85.307.314		
b. Keuntungan Untuk Anggota ( Menurut Simpanan 20 % )	Rp. 43.096.058	68.245.851		
c. Dana Pengurus Koperasi ( 10 % )	Rp. 21.548.029	34.122.925		
d. Dana Cadangan Modal ( 25 % )	Rp. 53.870.072	85.307.314		
e. Dana Kesejahteraan Anggota ( 5 % )	Rp. 10.774.014	17.061.463		
f. Dana Sosial ( 5 % )	Rp. 10.774.014	17.061.463		
g. Dana Pembangunan Daerah ( 5 % )	Rp. 10.774.014	17.061.463		
h. Dana Pendidikan ( 5 % )	Rp. 10.774.014	17.061.463		
<b>Hasil Usaha ( Yang Di Peroleh Bukan Dari Anggota Untuk Anggota )</b>			Rp. 79.507.513	72.284.141
a. 20 % Dana Pengurus	Rp. 15.901.503	14.456.828		
b. 40 % Untuk Cadangan	Rp. 31.803.005	28.913.656		
c. 40 % Untuk Anggota :				
* 20 Secara Merata	Rp. 15.901.503	14.456.828		
* 20 Berdasarkan Simpanan	Rp. 15.901.503	14.456.828		
	Rp. 294.987.802	413.513.396	Rp. 294.987.802	413.513.398

	2019	2018
<b>REKAPITULASI :</b>		
SHU dibagikan ke Anggota (1a+1b+2c)	Rp. 128.769.135	182.466.822
SHU dibagikan ke Pengurus (1c+2a)	Rp. 37.449.531	48.579.753
SHU untuk Modal Koperasi (1d+1e+1f+1g+1h+2b)	Rp. 128.769.135	182.466.823
<b>Jumlah</b>	Rp. 294.987.802	413.513.398

Bandung, 31 Desember 2019

Badan Pengawas  
KPRI KOPPU P3J,  
Ketua,

Syukur Wahyono, SH.

Sekretaris mewakili Anggota,

Rudy Rizal Pahlevi, A.Md.

Anggota,

Uyun Masnurmas, BE.

Ketua,

Yudi Hardiana, ST, MT.

Wakil Ketua,

Tati Tugarti, S.ST.

Sekretaris,

Retno Wulandari, S.Sos.

Bendahara I,

Asap Sulaeman, S.ST.

Bendahara II,

Dwi Lestari, SE.

**Gambar 4.1 Komposisi pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)**

REKAPITULASI KOMPOSISI PEMBAGIAN SHU  
 KPRI KOPPU P3J  
 TAHUN USAHA 2019

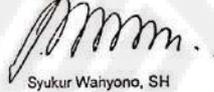
NO	NAMA	SIMPANAN			JASA		SHU
		POKOK	SUKARELA	WAJIB s/d Dec-19	TOKO s/d Dec-19	PINJAMAN s/d Dec-19	
REKAP							
1	GOLONGAN IV	2,500,000	4,209,022	369,340,000	1,987,820	33,100,000	13,825,942.1
2	GOLONGAN III	15,700,000	15,967,533	1,365,402,000	7,787,345	205,363,500	64,977,558.1
3	GOLONGAN II	6,700,000	3,168,395	417,341,000	3,955,750	90,075,000	24,176,671.1
4	GOLONGAN I	200,000	150,000	8,700,000	39,450	5,850,000	1,025,866.1
5	HARIAN	7,300,000	5,515,756	245,599,000	9,095,190	53,575,900	16,764,832.1
6	MAGANG BALAI & BIDANG	1,800,000	1,444,591	40,540,000	668,600	7,385,000	2,754,441.1
7	PENSIUN	1,300,000	3,414,713	71,667,000	2,348,000	8,650,000	3,769,205.1
9	ANGGOTA PASIF	325,000	6,108,865	45,856,000	-	-	1,464,616.1
8	PENSIUN 2013/Keluar	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		35,825,000	39,978,875	2,584,445,000	25,882,155	403,999,400	128,769,135.1

Bandung, 31 Desember 2019

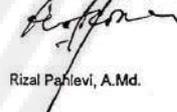
KPRI KOPPU P3J

Badan Pengawas

Ketua,

  
 Syukur Wahyono, SH

Sekretaris merangkap Anggota,

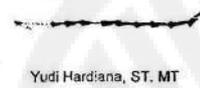
  
 Rizal Pahlevi, A.Md.

Anggota,

Uyun Masnurmas, BE.

Pengurus

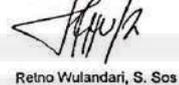
Ketua,

  
 Yudi Hardiana, ST. MT

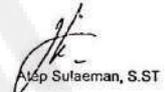
Wakil Ketua,

  
 Tati Tugiarli, S.ST

Sekretaris,

  
 Retno Wulandari, S. Sos

Bendahara I,

  
 Alap Sulaeman, S.ST

Bendahara II,

  
 Dwi Lestari, SE

Gambar 4.1 Rekapitulasi Komposisi Sisa Hasil Usaha (SHU)

#### f. Kesetiakawanan (*Solidarity*)

Kesetiakawanan merupakan landasan utama didirikannya koperasi, terutama koperasi yang lahir di kelompok orang-orang yang berpendapatan rendah. Terdorong oleh keinginan untuk memperbaiki taraf hidup ditengah keterbatasan modal yang dimiliki, anggota bahu-membahu, menyatukan visi dan misi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama dengan cara gotong royong dan saling tolong menolong.

## 2. Nilai-nilai Etis

### a. Kejujuran (*Honesty*)

Kejujuran manajemen koeprasi kepada anggotanya akan menumbuhkan kepercayaan anggota kepada koeprasi. Kepercayaan anggota kepada koeprasi akan meningkatkan rasa ikut memiliki sehingga partisipasi anggota dalam mengembangkan koeprasi juga akan meningkat. Dalam praktis dan penerapannya, secara hukum tingkat kejujuran seseorang biasanya dinilai dari ketetapan pengakuan atau apa yang dibicarakan seseorang dengan kebenaran dan kenyataan yang terjadi.

### b. Keterbukaan (*openess*)

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela dan terbuka bagi semua orang tanpa pandang bulu, yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan menerima tanggung jawab keanggotaanya, tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang social,ras,politik, atau agama. Anggota mempunyai hak untuk

mengetahui keadaan koperasi sebenarnya setiap saat, di sisi lain pengurus juga mempunyai kewajiban untuk membeberkan secara transparan keadaan koperasi kepada anggota.

c. Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*)

Nilai ini berkaitan dengan watak social koperasi yang berarti koperasi merasa memiliki tanggung jawab dalam memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat secara seutuhnya, antara lain: pemeliharaan kelestarian lingkungan, pemberantasan kemiskinan, penanggulangan pengangguran, narkoba, dan sebagainya. Semangat pengembangan social berkaitan dengan fungsi koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak social yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan perlu diupayakan koperasi agar dapat memperbaiki kehidupan anggotanya dan masyarakat lingkungan nya.

#### **4.1.2 Prinsip – Prinsip Koperasi**

Koperasi sebagai suatu organisasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bekerja untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dalam kegiatannya memerlukan sumber daya agar mampu menjalankan usaha dan mampu bersaing dengan pelaku ekonomi yang lain. Prinsip koperasi yang tertuang didalam Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 5 ayat 1 dan 2 yang dinyatakan :

Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka
- b. pengelolaan dilaksanakan secara demokrasi
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding besarnya jasa usaha masing – masing anggota
- d. pemberian balas jasa terhadap modal
- e. kemandirian

#### **4.2 Akuntansi dan Sistem Akuntansi**

Pengertian akuntansi menurut Mulyadi Akuntansi berfungsi sebagai alat mencatat dan menyajikan laporan keuangan untuk mempermudah manajemen dalam mengelola perusahaan.

Pengertian sistem akuntansi menurut Winarto (2007:9) merupakan bidang ilmu akuntansi yang mempelajari perancangan dan pengevaluasian sistem informasi akuntansi di dalam suatu perusahaan, dalam sistem akuntansi akan banyak penyusunan berbagai prosedur akuntansi yang digunakan untuk menangani suatu peristiwa (transaksi) mulai dari mencatat data, menggunakan dokumen yang sesuai, hingga menyajikan laporan informasi yang baik.

Koperasi pegawai Kantor Pusat Penelitian dan pengembangan Jalan Departemen Pekerjaan Umum adalah koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam, sehingga sumber utama dari piutang berasal dalam bidang simpan

pinjam dari anggota KPRI itu sendiri. Catatan akuntansi yang digunakan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) KOPPU P3J adalah sebagai berikut:

#### 1. Buku Kas Harian

Buku kas harian digunakan untuk membukukan penerimaan dan pengeluaran uang secara terinci

#### 2. Buku Rekapitulasi Kas Bulanan

Buku kas rekapitulasi ini digunakan untuk merakapitulasi dari buku kas harian ke dalam buku kas bulanan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam neraca dan dilaporkan dalam buku RAT.

#### 3. Buku Piutang

Buku piutang digunakan untuk mencatat jumlah dan nama anggota yang melakukan pinjaman di koperasi dan untuk mencatat angsuran pembayaran anggota.

#### 4. Neraca Lajur

Neraca lajur ini digunakan untuk mencatat jumlah dan nama anggota yang melakukan pinjaman di koperasi dan untuk mencatat angsuran pembayaran anggota.

## 5. Neraca

Neraca ini digunakan untuk mengetahui jumlah asset dan KPRI KOPPU P3J dimana Neraca ini selalu dimunculkan dalam RAT

Sistem akuntansi pada KPRI KOPPU P3J yaitu berupa jaringan prosedur yang memproses data dari prosedur penerimaan anggota baru, dan transaksi penerimaan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela anggota lalu dimasukan kedalam daftar simpanan anggota dan data tersebut dijadikan sebagai dokumen sumber dari pembuatan laporan pertanggung jawaban pengurus. Pengelolaan sistem akuntansi pada KOPPU P3J ini dilaksanakan dengan sistem Komputerisasi. Hal berikut sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Endah Safriyani sebagai Bagian Keuangan sekaligus penanggung jawab sistem akuntansi KPRI KOPPU P3J.

### **4.3 Sistem Akuntansi Piutang Unit Simpan Pinjam**

Sistem akuntansi piutang dirancang untuk mencatat transaksi terjadinya piutang dan berkurangnya piutang. Menurut Mulyadi (2016) terjadinya piutang berasal dari transaksi penjualan kredit dan berkurangnya piutang berasal dari transaksi retur penjualan dan penerimaan kas dari piutang. Transaksi berkurangnya piutang yang muncul dari transaksi penerimaan kas dari piutang dikelompokkan kedalam sistem akuntansi kas.

Sistem akuntansi piutang simpan pinjam pada KPRI KOPPU P3J yakni berupa jaringan prosedur yang mengolah data dari transaksi permohonan pinjaman dan pemberian pinjaman yang akan dilunasi sesuai dengan jangka waktu

yang telah disepakati pada saat peminjaman oleh anggota melalui angsuran yang dibayarkan setiap bulan. Fungsi yang terkait dalam Sisten Akuntansi Piutang pada KPRI KOPPU P3J melibatkan bagian akuntansi dan bagian kas, sehingga KPRI KOPPU P3J dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat berjalan baik. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi piutang pada KPRI KOPPU P3J sudah mengacu pada teori akuntansi yang dikemukakan (Mulyadi, 2001), yaitu bukti kas masuk. Sistem akuntansi piutang simpan pinjam di KPRI KOPPU P3J ini merupakan salah satu jenis bidang usaha dari anggota yang menjadi prioritas utama karena banyak digunakan oleh para anggota

### **1. Pencatatan Piutang**

Dalam prosedur pencatatan piutang, prosedur ini bertujuan untuk mencatat jumlah piutang anggota. Dalam prosedur ini fungsi akuntansi mencatat piutang ke dalam buku piutang.

Dokumen yang digunakan sebagai input pencatatan piutang adalah buku piutang. Pencatatan piutang KPRI KOPPU P3J menggunakan metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang. Di KPRI KOPPU P3J ini hanya menggunakan metode posting harian dimana dilakukan posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulis sistem komputerisasi.

### **2. Pernyataan Piutang**

Pernyataan piutang adalah formulir yang menyajikan jumlah kewajiban debitor pada tanggal tertentu dan (dalam pernyataan piutang bentuk tertentu) disertai dengan rinciannya (Mulyadi, 2001: 270). Pernyataan piutang adalah

formulir yang digunakan untuk mengkonfirmasi mengenai jumlah piutang debitur dan tidak berfungsi sebagai alat tagih (Nugroho, 2001:337)

Pernyataan piutang yang ada pada KPRI KOPPU P3J adalah pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan saldo akhir bulan ini hanya menyajikan saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan saja. Pernyataan ini sangat sederhana cara pembuatannya, namun tidak memberikan informasi apa pun kepada debitur untuk dasar rekapitulasi dengan catatannya, jika saldo yang tercantum dalam pernyataan piutang berbeda dengan saldo yang tercantum dalam catatannya. Namun bagian akuntansi akan menunjukkan surat permohonan pinjaman kepada anggota dimana jumlah yang dipinjam akan dicocokkan dengan nominal yang ada dicatatannya tersebut.

#### **4.4 Prosedur Sistem Akuntansi Piutang Simpan Pinjam pada Koperasi KOPPU P3J**

Berikut adalah Prosedur Pinjaman pada Koperasi KOPPU P3J

Melampirkan Persyaratan :

- Sudah berstatus anggota dengan melampirkan kartu anggota (PNS/ Non PNS)
- Pengisian formulir yang sudah disediakan oleh pihak koperasi
- Sertakan fotocopy KTP, Kartu Keluarga
- Sertakan slip gaji bulan terakhir
- Menyertakan surat pernyataan alasan peminjaman

Pemeriksaan dokumen persyaratan

- Pemeriksaan berkas akan dilakukan oleh Bagian Keuangan

- Pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh bagian keuangan membutuhkan waktu satu sampai dua hari kerja.

Keputusan persetujuan pinjaman

- Setelah lolos pemeriksaan maka bagian keuangan dapat memutuskan disetujui atau tidak

- setelah disetujui peminjam akan dihubungi untuk melakukan akad peminjaman dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pembayaran pinjaman dimulai dari tanggal 4 setiap bulannya untuk PNS maupun Non PNS
- 2) Jangka waktu pinjaman lima (5) tahun (PNS/NonPNS)
- 3) Jasa pinjaman 1% perbulan (flat)
- 4) Besar pinjaman disesuaikan dengan dana yang ada
- 5) Besar cicilan pinjaman per bulan, maksimum 70% dari sisa gaji bulanan yang diterima

Pencairan Dana

Proses pencairan dana dilakukan dengan pada saat melakukan akad peminjaman yang diberikan langsung oleh Bagian Keuangan kepada peminjam.

#### **4.5 Kendala Dan Solusi Yang Ada Pada Sistem Akuntansi Piutang di KPRI KOPPU P3J**

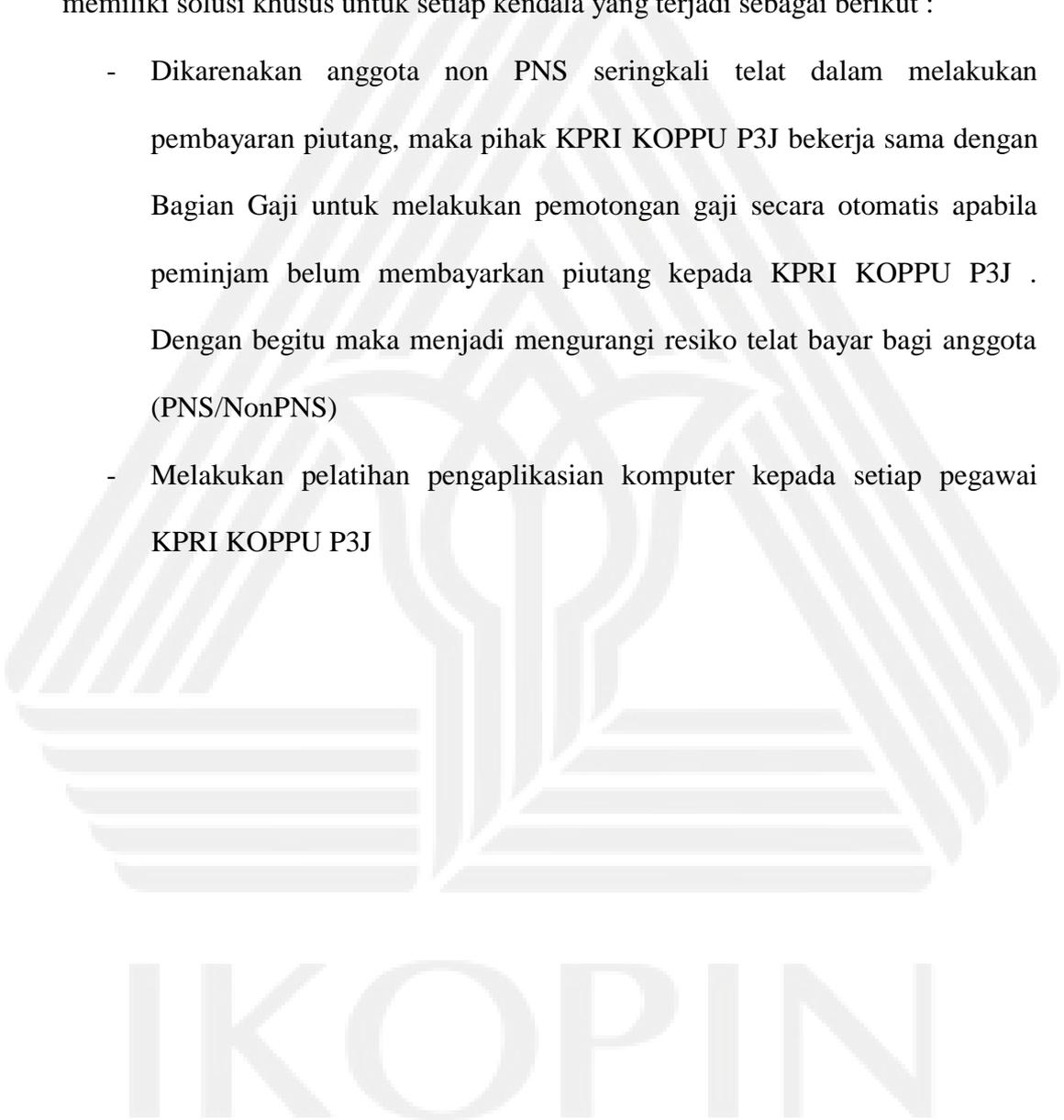
Berikut adalah permasalahan yang terjadi pada sistem akuntansi piutang di KPRI KOPPU P3J :

- Anggota Non PNS seringkali telat dalam melakukan pembayaran piutang

- Dalam pelaksanaan sistem akuntansi piutang KPRI KOPPU P3J kurangnya keahlian pegawai dalam pengaplikasian komputer

Setelah mengetahui akan adanya beberapa kendala, pihak KPRI KOPPU P3J memiliki solusi khusus untuk setiap kendala yang terjadi sebagai berikut :

- Dikarenakan anggota non PNS seringkali telat dalam melakukan pembayaran piutang, maka pihak KPRI KOPPU P3J bekerja sama dengan Bagian Gaji untuk melakukan pemotongan gaji secara otomatis apabila peminjam belum membayarkan piutang kepada KPRI KOPPU P3J . Dengan begitu maka menjadi mengurangi resiko telat bayar bagi anggota (PNS/NonPNS)
- Melakukan pelatihan pengaplikasian komputer kepada setiap pegawai KPRI KOPPU P3J



IKOPIN